IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI

Lili Suryana¹, Ulya Atsani²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: lilisuryana@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The main problem in this thesis is how to implement the main tasks and functions of the head of affairs in the Nagari Simawang government and how to review Islamic constitutional law on the implementation of the main tasks and functions of the head of affairs in the Nagari Simawang government. The purpose of this discussion is to find and describe the implementation of the main duties and functions of the head of affairs in the government of Nagari Simawang and to find out and describe the review of Islamic constitutional law on the implementation of the main tasks and functions of the head of affairs in the government of Nagari Simawang. The type of research that the author uses is field research (field research). Based on the research that the author did, it was found that, several functions carried out by the Head of Government Affairs in Tanah Datar Regency Number 4 of 2008 regarding Nagari had not run effectively because there were several functions that were less effective, namely the function of providing services to the community in the field of land / land. agrarian affairs in accordance with applicable laws and regulations and in the function of assisting tasks in the field of collecting land and building taxes.*

Keywords: *Constitutional Law; Nagari; Perda Tanah Datar.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten atau Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 1 ayat (3) dan (4) yang dijelaskan bahwa Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat pada desa yang bersangkutan.

Otonomi yang dimiliki oleh kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan oleh undang-undang, sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal usul dan

adat istiadat. Artinya, jika desa memang memiliki urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan tersebut diakui undang-undang.

Sejauh ini, studi tentang tugas pokok dan fungsi dari kepala urusan pemerintahan mencakup beberapa hal diantaranya : “Penelitian yang dilakukan oleh Liza Rahayu (2019), Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar Penelitian yang dilakukan oleh Afdhal Prima (2014), Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau dengan judul “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar”, Penelitian yang dilakukan oleh Afriawery Achmad (2019), jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul “Kedudukan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Di Kota Pariaman), Penelitian yang dilakukan oleh Fuadil Hukum (2013) , Universitas Andalas dengan Judul Skripsi Kinerja Pemerintah Nagari Tamjung Barulak (Studi Kasus: Optimalisasi fungsi Pelayanan tanpa adanya sekretaris Nagari).

Menurut sistem ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian tentang Pemerintahan Desa ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: 1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Dan, 2). Daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atas desa. Demikian pula dalam pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: 1). Dalam daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk desa. Dan, 2). Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai desa.

Dengan diadakannya pemilu serentak yang akan melahirkan sosok pemimpin yang akan melaksanakan urusan pemerintahan dari tingkat provinsi sampai ketinggian Kabupaten demi kemajuan Negara serta kelancaran Pembangunan. Di tingkat Kabupaten masih ada tingkatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan mulai dari Bupati dan Perangkat Desa maka dari itu lahirlah suatu peraturan perundang-undangan yang disebut dengan peraturan daerah (PERDA). Peraturan tersebut mengatur tentang pokok-pokok pengertian pemerintah pusat dan daerah, administrasi pemerintahan di daerah, administrasi pemerintahan di desa dan kelurahan serta kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah (Kansil, 19).

Di Sumatera Barat satuan pemerintahan terkecil adalah Nagari ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Nagari merupakan unit pemukiman yang berawal dari sebuah taratak, dusun, dan koto serta berkembang menjadi sebuah nagari dalam tradisi adat Minangkabau. Nagari menjadi fase terakhir dari perkembangan dusun, taratak dan koto, sehingga yang menjadi unit yang memiliki penduduk masing-masing punya hubungan kekeluargaan dan kerabat. Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pemerintahan Nagari menurut peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang ada di Nagari. Pemerintahan nagari tersebut terdiri atas Wali Nagari dan perangkat Nagari, Sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya), pemerinthan Nagari yang disebut lembaga eksekutif di Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang menjalankan fungsi legislasi di Nagari menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari serta menyalurkan aspirasi rakyat Nagari dan juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat(1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu “ Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) perangkat nagari memiliki fungsi sebagai berikut (a) fungsi dari Kepala Urusan pemerintahan 1). mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan 2). melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3). melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4). membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan 5). membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan 6). membantu Wali Nagari membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

Berdasarkan observasi awal dengan kepala urusan pemerintahan yaitu Ibu Ade Ariyani, A.Md yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum berjalan secara efektif masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan pelayanan dibidang pertanahan/keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti: masyarakat tidak memiliki kejelasan dimana lokasi tanah, ukuran tanah serta status tanah dan mereka tidak pula ingin menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah nagari dengan alasan masyarakat tidak ingin melibatkan nagari dalam masalah tersebut, apabila pemerintah nagari mengetahui hal tersebut maka, pemerintah nagari yang akan menyelesaikan masalah tersebut. (Kepala Urusan Pemerintahan, Wawancara, 01 Juli 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian *field research* studi lapangan, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan informasi adalah suatu yang belum mempunyai manfaat bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu proses yang baik. Maka disini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi lapangan. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas Pokok Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Simawang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu: "Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wali Jorong Batulimbak yang menjelaskan bahwa tugas perangkat nagari secara administratif memiliki kendala salah satunya ketika masyarakat melakukan pengurusan surat jual beli tanah, masyarakat yang bersangkutan datang langsung ke kantor dalam pengurusan tersebut harus berkoordinasi dengan niniak mamak, kepala kau serta ali jorong setempat agar masyarakat lebih mudah dan lebih cepat dalam mengurus surat tersebut.

Implementasi Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Di Nagari Simawang

Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan merupakan perangkat atau staf yang membantu sekretaris Nagari sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk terciptanya kesejahteraan pemerintahan Nagari, Kepala urusan pemerintahan melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai informasi, Laporan baik tertulis maupun tidak tertulis dan data yang menggambarkan berbagai kegiatan yang hendak diketahui penerapannya di pemerintahan Nagari.

Kepala urusan pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil nagari. Dalam imlementasi tugas pokok dan fungsi kepala urusan pemerintahan Nagari Simawang dapat diatur untuk mempunyai tugas kepala urusan pemerintahan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui sekretaris Nagari.

Menurut Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) perangkat nagari memiliki fungsi sebagai berikut (a) fungsi dari Kepala Urusan pemerintahan 1). mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan 2). melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3). melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4). membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan 5). membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan 6). membantu Wali Nagari membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wali Nagari Bapak Firman Malin Panduko menjelaskan bahwa kedudukan kepala urusan pemerintahan sangat membantu menjalankan urusan pemerintahan di Nagari Selain membantu tugas dan roda pemerintahan di nagari, kepala pemerintahan juga membantu tugas wali nagari contohnya: ketika wali nagari dan sekretaris nagari dinas diluar nagari, jika wali nagari dan sekretaris nagari dinas keluar nagari maka, kepala urusan pemerintahan yang menjalankan urusan di kantor wali nagari, ketika ada

urusan surat-menyurat maka kaur pemerintahan yang bertugas untuk menyelesaikannya atau menandatangani kecuali surat Pengantar Nikah. (Firman Malin Panduko, Wawancara Tanggal 06 juli 2022).

Pembahasan Hasil Penelitian

Hukum Tata Negara Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam pandangan agama islam yang mencakup filsafat, hukum, tradisi, sejarah dan pemikiran para tokoh. Pokok kajian *fiqh siyasa dusturiyah* yaitu *al-sulthah al-tanfidziyah* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat kebijakan pemerintah ini merupakan perluasan dari dari perundang-undangan yang berkaitan antara objek tersebut yakni yang dibuat oleh anggota legislatif Disini, pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara dalam mengatur rakyat agar terciptanya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan undang-undang.

Tugas dari *al-sulthah tanfidziyah* ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka, negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan undang-undang yang telah dibuat tersebut dan negara juga melaksanakan kebijaksanaan baik itu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini kepala negara dan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

Menurut analisa penulis *al-sulthah tanfidziyah* dalam melaksanakan tugas memiliki hak dalam mengurus dan mengatur setiap lapisan masyarakat untuk tidak melanggar setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah namun, *al-sulthah tanfidziyah* juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keinginan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan ketentuan islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan tugas dari Kepala Urusan Pemerintahan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu “ Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti masih ada kendala yang dihadapi, seperti dalam pelayanan administrasi pengurusan surat menyurat. Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan belum terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Pasal 17 Nomor 4 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan, e. Membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan, f. Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada

Bupati). Yang mana, implementasinya belum berjalan secara efektif karena ada beberapa fungsi yang masih ada kendala dalam penerapannya.

Saran yang ingin dikemukakan oleh peneliti yaitu Untuk Kaur Pemerintahan diharapkan untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kepala urusan pemerintahan itu sendiri sehingga masyarakat tidak canggung menyampaikan masalah di bidang pemerintahan dan memiliki jalan keluar dan saran yang baik dari pemerintahan Nagari, Untuk pemerintahan Nagari untuk selalu memperhatikan bagaimana kinerja dari masing-masing perangkat Nagari, dan selalu memperhatikan keluhan masyarakat, serta meningkatkan komunikasi yang baik dengan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. B. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Djazuli. A. (2003). *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal. M., & Siyasah, F. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kansil. C. S. T. (2003). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurcholis. H. (2010). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Pulungan. J. S. (2016). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Kencana.
- Putri. E. F. & Zainuddin, Z. (2022). KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 19-26.
- Rahayu. L. (2019). *Pelaksanaan tugas badan permusyawaratan rakyat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari perspektif hukum tata negara islam*. Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Ratna. Y. S. (2018). *Praktek "solang manyolang pitih" di nagari simawang kecamatan rambatan kabupaten tanah datar menurut fikih muamalah*. Skripsi tidak diterbitkan.
- Salam. M., & Mustafa, A. (2021). Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, 3(1), 115-125.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico Bandung
- Soeroso. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran politik islam*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yazir. I. (2018) *Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari BPRN) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi tidak diterbitkan.

- Yustim Y., Nelisma. Y., Silvianetri. S., & Mazida. Y. (2022). LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8-16.
- Zainuddin. M. 2016. *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.